



PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI BALI

Yolanda Sintaman Olivia¹ Anak Agung Bagus Putu Widanta²

Abstract

Keywords:

Economic growth;
Regency/City Minimum Wage;
Government Expenditures;
Employment.

The purpose of this study was to analyze the effect of economic growth, district/city minimum wages, and government spending on labor absorption in the province of Bali. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. Based on the analysis results indicate that the level of economic growth has a negative (not significant) effect on the level of employment in the Regency/City in the Province of Bali. The district/city minimum wage level has a positive (significant) effect on the district/city employment rate in Bali Province. The level of government expenditure has a positive (significant) effect on the level of absorption of Regency/City workers in the Province of Bali. Based on the research results, it can be suggested that the government can increase visits for both foreign and domestic tourists, thereby increasing the value of GRDP and the rate of economic growth. The government is also expected to provide employment programs so that the programs implemented can be right on target, with the right quality and on time as well as increasing labor productivity through education and labor training so as to create job opportunities for quality workers.

Kata Kunci:

Pertumbuhan Ekonomi;
Upah Minimum
Kabupaten/Kota;
Pengeluaran Pemerintah;
Penyerapan Tenaga Kerja

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi bali. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif (tidak signifikan) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tingkat upah minimum kabupaten/kota memiliki pengaruh positif (signifikan) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. Tingkat pengeluaran pemerintah berpengaruh positif (signifikan) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan pemerintah dapat meningkatkan kunjungan bagi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, dengan itu akan dapat meningkatkan nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga diharapkan dapat program-program penyerapan tenaga kerja agar program yang dilaksanakan dapat tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu serta meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sehingga terciptanya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dengan mutu yang berkualitas.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email:
yolandasintaman@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah tenaga kerja yang mengalami peningkatan proses produksi barang dan jasa dalam pertumbuhan ekonomi (Yasa dan Sudarsana, 2015). Salah satu provinsi dengan kondisi tenaga kerjanya yang juga mengalami peningkatan adalah Provinsi Bali. Menurut BPS Provinsi Bali, dalam kurun waktu empat tahun terakhir jumlah tenaga kerja di Provinsi Bali telah mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja tertinggi terdapat di wilayah Kota Denpasar, sedangkan tenaga kerja terendah terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung. Jumlah penduduk yang besar yang disertai dengan kualitas yang memadai akan mampu menciptakan permintaan serta dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi (Kartika & Wenagama, 2015).

Peningkatan jumlah tenaga kerja dapat berdampak positif dan negatif. Dari sisi positif, tenaga kerja dapat dikatakan sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting guna keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di suatu negara (Prastyadewi, 2014). Sementara dari sisi negatif, meningkatnya jumlah tenaga kerja justru seringkali menjadi persoalan ekonomi yang juga sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah (Wijayanto dkk. 2020) karena tenaga kerja yang tidak terserap menyebabkan munculnya pengangguran. Salah satu indikator tingginya pengangguran karena belum meratanya pembangunan di segala bidang, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk/angkatan kerja yang cepat dan dinamis (Ningsih dkk. 2015). Makadari itu, daerah yang telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh yang tercermin dari berkurangnya tingkat kemiskinan (Rusniati, 2018).

Pengaruh lainnya dari kondisi ketenagakerjaan adalah upah minimum yang tidak memadai. Penetapan upah minimum ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan produksi, serta peningkatan investasi yang ditanamkan dalam suatu industri akibat adanya permintaan (Havira, 2017) dimana hal ini sejalan dengan teori upah efisiensi. Kebijakan yang sering ditempuh oleh pemerintah Bali untuk meningkatkan kesempatan kerja, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan kebijakan penetapan upah minimum. Teori upah efisiensi ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nababan, 2017 yang mengatakan bahwa upah minimum dapat meningkatkan kesempatan kerja. Hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Anuari (2018) bahwa kenaikan upah minimum akan mengakibatkan berkurangnya lapangan kerja yang juga akan berimbas pada berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain temuan tersebut menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja sehingga jumlah penyerapan tenaga kerja juga berkurang. Tingkat upah minimum juga dapat dianalisis dengan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaannya, tingkat upah tenaga kerja cenderung turun. Begitu pula sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja lebih kecil daripada permintaannya maka tingkat upah akan cenderung naik (Suciptawati dkk. 2012).

Pengaruh lainnya dari kondisi ketenagakerjaan adalah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan dalam suatu kegiatan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat menaikkan pendapatan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Adanya kenaikan permintaan agregat sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan *output* produksinya. Pengeluaran pemerintah juga dapat membantu proses pertumbuhan ekonomi (Dalamagas. 2010). Butkiewicz & Yanikkaya (2011) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah digunakan sebagai modal dan pendidikan adalah investasi yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi. Hidayah (2020) menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk bantuan diprioritaskan untuk sektor-sektor yang dapat merangsang dan menimbulkan dampak kegiatan ekonomi secara lebih luas dan intensif. Pada nantinya pengeluaran pemerintah

tersebut mengakibatkan pertumbuhan pada sektor industri sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.

Berdasarkan uraian permasalahan dan penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.
- 2) Pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, dengan menggunakan metode observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu data 9 kabupaten/kota Provinsi Bali dalam periode tahun 2017-2020 sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini yaitu 36 pengamatan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \text{eit} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

Y = Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel dependen

X1 = Pertumbuhan Ekonomi

X2 = Upah Minimum Kabupaten/Kota

X3 = Pengeluaran Pemerintah

$\beta(1,2,3)$ = Koefisien regresi masing- masing variabel independen

eit = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Perkembangan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Orang)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	162665	162872	143403	158203
Kab. Tabanan	246754	274282	270736	265435
Kab. Badung	343229	364318	382119	367619
Kab. Gianyar	300370	310651	303944	270591
Kab. Klungkung	103972	106942	105314	101058
Kab. Bangli	142559	148423	145481	143650
Kab. Karangasem	238742	256342	254667	252869
Kab. Buleleng	358107	375393	339818	362851
Kota Denpasar	501909	526484	523524	501143
Provinsi Bali	2398307	2525707	2469006	2423419

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mengenai penyerapan usia kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2017 hingga tahun 2020 diketahui bahwa Kota Denpasar memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi yakni sebesar 765.044 orang pada tahun 2020, sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja terendah berada di Kabupaten Klungkung yakni

sebesar 136.183 pada tahun 2017. Tidak meratanya tingkat penyerapan tenaga kerja Provinsi Bali dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu pengaruhnya adalah jumlah tenaga kerja yang tidak diiringin oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi dan kapabilitas manusia. Peningkatan pertumbuhan penduduk akan meningkatkan tenaga kerja dan secara langsung pertambahan tersebut akan mempengaruhi jumlah output setiap daerah. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang berperan penting dalam menggerakkan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan komoditas dalam perekonomian.

Tabel 2.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Persen)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	5.28	5.59	5.56	-4.96
Kab. Tabanan	5.37	5.71	5.59	-6.14
Kab. Badung	6.08	6.73	5.81	-16.52
Kab. Gianyar	5.46	6.01	5.61	-8.38
Kab. Klungkung	5.32	5.48	5.42	-6.35
Kab. Bangli	5.31	5.48	5.46	-4.10
Kab. Karangasem	5.06	5.44	5.50	-4.45
Kab. Buleleng	5.38	5.60	5.53	-5.76
Kota Denpasar	6.05	6.42	5.82	-9.42
Provinsi Bali	5.56	6.31	5.60	-9.31

Peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali diduga dipengaruhi oleh terkendalinya tingkat inflasi, bertambahnya jumlah produk domestik regional bruto (PDRB) dan besar kecilnya pertumbuhan upah minimum kabupaten/kota yang ditentukan. Sebaliknya berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja diduga dipengaruhi oleh turunnya produktifitas yang disebabkan tingkat inflasi yang tak terkendali, berkurangnya jumlah PDRB dan terlalu besarnya pertumbuhan upah minimum kabupaten/kota yang ditentukan (Indradewa dan Natha. 2015). Seiring dengan peningkatan PDRB di Provinsi Bali, maka perekonomian di Provinsi Bali pun harus semakin bertumbuh dan harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk (Rustariyuni. 2014).

Tabel 3.
Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	2006617	2181393	2356559	2557102
Kab. Tabanan	2059965	2239500	2419332	2625217
Kab. Badung	2299311	2499581	2700297	2930093
Kab. Gianyar	2061233	2240766	2421000	2627000
Kab. Klungkung	1991529	2164992	2338840	2538000
Kab. Bangli	1957734	2128253	2299152	2494810
Kab. Karangasem	2051879	2180000	2355054	2555469
Kab. Buleleng	1991529	2165000	2338850	2538000
Kota Denpasar	2173000	2363000	2553000	2770300
Provinsi Bali	1956727	2127157	2297969	2493523

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh Tabel 3, Kota Denpasar memiliki tingkat upah minimum tertinggi yakni sebesar 2.770.300 pada tahun 2020 sedangkan Kabupaten Jembrana memiliki tingkat upah minimum terendah yakni sebesar 2.006.617 pada tahun 2017. Perkembangan angka upah minimum yang diberlakukan di setiap kabupaten/kota

Provinsi Bali setiap tahunnya tentu akan membuat produktifitas tenaga kerja menjadi meningkat. Hal tersebut dikarenakan tenaga kerja mendapat upah yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Tabel 4.
Perkembangan Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Miliar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	Rp 1.186.843.211	Rp 1.096.498.631	Rp 1.144.974.583	Rp 1.089.673.620
Kab. Tabanan	Rp 1.871.864.103	Rp 1.862.277.204	Rp 1.926.615.593	Rp 1.789.669.930
Kab. Badung	Rp 4.939.386.134	Rp 5.420.009.298	Rp 5.792.967.591	Rp 3.906.157.464
Kab. Gianyar	Rp 1.808.814.501	Rp 2.002.646.874	Rp 2.307.617.711	Rp 1.884.736.534
Kab. Klungkung	Rp 1.098.938.729	Rp 1.100.138.936	Rp 1.215.589.170	Rp 1.104.884.193
Kab. Bangli	Rp 1.093.254.800	Rp 1.106.097.725	Rp 1.180.012.548	Rp 1.012.111.114
Kab. Karangasem	Rp 1.525.846.347	Rp 1.482.949.917	Rp 1.648.390.692	Rp 1.475.503.925
Kab. Buleleng	Rp 2.200.113.190	Rp 2.052.836.001	Rp 2.318.758.511	Rp 2.003.219.088
Kota Denpasar	Rp 2.058.136.261	Rp 2.121.040.458	Rp 2.193.530.988	Rp 1.964.054.093
Provinsi Bali	Rp 5.992.161.668	Rp 6.259.367.608	Rp 6.645.538.873	Rp 5.718.339.699

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2020 diketahui bahwa Kabupaten Badung memiliki tingkat pengeluaran pemerintah tertinggi yakni sebesar 5.792.967.591 pada tahun 2019 sedangkan Kabupaten Bangli memiliki tingkat pengeluaran pemerintah terendah yakni sebesar 1.012.111.114 pada tahun 2020. Pengeluaran pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya kejadian *force majeure* berupa bencana wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan belum dibukanya pariwisata untuk wisatawan mancanegara dan banyak negara terutama yang menjadi langganan Bali juga masih belum membuka penerbangan menuju Indonesia (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2020).

Tabel 5.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	PTK	PE	UPM	PP
Mean	373244.4	2.388611	2338149.	1.929444
Median	361867.5	5.460000	2338845.	1.467000
Maximum	765044.0	6.730000	2930093.	7.941000
Minimum	136183.0	-16.52000	1957734.	0.411000
Std. Dev.	182975.1	5.997161	242293.7	1.667363
Observations	36	36	36	36

Berdasarkan tabel 5, hasil analisis statistik deskriptif dijelaskan sebagai berikut. Variabel dependen penyerapan tenaga kerja (PTK), penyerapan tenaga kerja tertinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar 765.044 orang terjadi di Kota Denpasar tahun 2020 dan penyerapan tenaga kerja terendah sebesar 136.183 orang terjadi di Kabupaten Klungkung tahun 2017. Rata-rata penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017-2020 sebesar 373.244 orang. Nilai median dan standar deviasi penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota di Provinsi Bali masing-masing sebesar 361.867 dan 182.975. Variabel independen pertumbuhan ekonomi (PE), pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar 6.73 persen terjadi di Kabupaten Badung tahun 2018 dan pertumbuhan ekonomi terendah sebesar -16.52 persen terjadi di Kabupaten Badung tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017-2020 sebesar 2.39

persen. Nilai median dan standar deviasi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali masing-masing sebesar 5.46 dan 5.99. Variabel independen upah minimum (UPM), upah minimum tertinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar Rp. 2.930.093 terjadi di Kabupaten Badung tahun 2020 dan upah minimum terendah sebesar Rp. 1.957.734 terjadi di Kabupaten Bangli tahun 2017. Rata-rata upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017-2020 sebesar Rp. 2.338.149. Nilai median dan standar deviasi upah minimum di kabupaten/kota di Provinsi Bali masing-masing sebesar Rp. 2.338.845 dan Rp. 242.293. Variabel independen pengeluaran pemerintah (PP), pengeluaran pemerintah tertinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar Rp. 7,94 triliun terjadi di Kabupaten Badung tahun 2019 dan pengeluaran pemerintah terendah sebesar Rp. 411 milyar terjadi di Kabupaten Jembrana tahun 2020. Rata-rata pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota di Provinsi Bali sebesar Rp. 1,93 triliun. Nilai median dan standar deviasi pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota di Provinsi Bali masing-masing sebesar Rp. 1,47 triliun dan Rp. 1,67 triliun.

Tabel 6.
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9271.506308	(8,24)	0.0000
Cross-section Chi-square	289.310845	8	0.0000

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai probabilitas *cross-section chi square* sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha (0,05) sehingga H_0 diterima. Maka metode yang sesuai untuk melakukan uji regresi pada penelitian adalah model *fixed effect*.

Tabel 7.
Hasil Uji Normalitas

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27.334895	3	0.0000

Besarnya probabilitas *cross-section random* sebesar 0.0000 lebih kecil dari alpha (0,05) sehingga H_0 diterima. Maka metode yang sesuai untuk melakukan uji regresi pada penelitian adalah model *fixed effect*. Hasil uji Chow dan uji Hausman menunjukkan model terbaik pada penelitian adalah model *fixed effect*, sehingga tidak perlu dilakukan uji Lagrange Multiplier untuk menunjukkan model terbaik bagi penelitian, maka metode estimasi terbaik dan digunakan dalam penelitian adalah model *fixed effect*.

Tabel 8.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	t-statistic	Prob	Signifikansi
PE	-0.69954	-0.0245	Signifikan
UPM	0.15304	0.0424	Signifikan
PP	0.62684	0.0364	Signifikan

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan koefisien korelasi antara variabel independen pertumbuhan ekonomi (PE), upah minimum (UPM) dan pengeluaran pemerintah (PP) lebih kecil (<) 0,80, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa model regresi dan ketiga variabel independen pada penelitian tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Tabel 8.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.104988	0.092383	1.136447	0.2670
PE	-0.000332	0.000250	-1.326003	0.1973
UPM	4.858226	0.011274	0.004313	0.9966
PP	0.008471	0.006388	1.326071	0.1973

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh prob masing-masing variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi (PE), upah minimum (UPM) dan pengeluaran pemerintah (PP) memiliki nilai > alpha 0,05 sebesar 0.197, 0.997 dan 0.197 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Tabel 9.
Hasil Uji Analisis Regresi Berganda Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.372705	0.187556	17.98238	0.0000
PE	-0.002321	0.000508	-4.570408	0.0001
UPM	0.215864	0.022889	9.430860	0.0000
PP	0.063711	0.012970	4.912332	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999840	Mean dependent var	5.517339
Adjusted R-squared	0.999767	S.D. dependent var	0.227535
S.E. of regression	0.003471	Akaike info criterion	-8.227689
Sum squared resid	0.000289	Schwarz criterion	-7.699849
Log likelihood	160.0984	Hannan-Quinn criter.	-8.043459
F-statistic	13672.71	Durbin-Watson stat	2.389484
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil uji F pada Tabel 9 diperoleh nilai probabilitas F-statistic lebih kecil dari alpha (0,05) yaitu sebesar 0.0000 < 0,05 dan oleh karena Fhitung (13672.71) > Ftabel (2.90), artinya variabel independen pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pengeluaran pemerintah secara

simultan/bersamaan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017-2020. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan oleh penulis dinyatakan diterima. Nilai *adjusted r square* sebesar 0.9997, menunjukkan bahwa proporsi pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017-2020 sebesar 99.97 persen, sedangkan sisanya sebesar 0.03 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian.

Nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi (PE) $< \alpha 0.05$ sebesar $0.0001 < 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel sebesar $4.570 > 2.036$, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017-2020. Besarnya *Fixed Effect* dari tingkat pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sarolangun adalah sebesar -0.107 persen. Dengan demikian peningkatan satu tahun pertumbuhan ekonomi akan mampu menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar -0.107 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budhijana (2020) hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih besar di topang oleh konsumsi bukan investasi atau modal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berpengaruh signifikan tersebut mencerminkan kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang ada karena masih tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Nilai probabilitas upah minimum (UPM) $< \alpha 0.05$ sebesar $0.0000 < 0,05$ dan oleh karena t hitung (9.431) $> t$ tabel (2.036). Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017-2020. Hasil penelitian ini didukung oleh studi empiris dari penelitian yang dibuat oleh Adam Smith dalam (Purnami, 2015) menyatakan bahwa ketika terjadi kenaikan tingkat upah rata-rata, maka akan diikuti oleh turunnya jumlah tenaga kerja yang diminta sehingga terjadinya pengangguran. Sebaliknya, ketika turunnya tingkat upah rata-rata akan diikuti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diminta. Tenaga kerja cenderung meningkatkan waktu kerja untuk menambah penghasilan. Namun jika tingkat upah sudah cukup tinggi, maka tenaga kerja akan mengurangi waktu bekerja dan menambah waktu istirahat.

Nilai probabilitas pengeluaran pemerintah (PP) $< \alpha 0.05$ sebesar $0.0001 < 0,05$ dan oleh karena t hitung (4.912) $> t$ tabel > 2.036 , hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2017-2020. Hasil penelitian ini didukung oleh studi empiris dari penelitian yang dibuat oleh Pratiwi (2019) menyatakan kekuatan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia, harus bisa mengidentifikasi sektor prioritas seperti pendidikan dan kesempatan kerja yang mempunyai potensi paling tinggi untuk meningkatkan pembangunan manusia. Besarnya *Fixed Effect* dari tingkat pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali adalah sebesar 0.064 persen. Dengan demikian peningkatan satu tahun pengeluaran pemerintah akan mampu meningkatkan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 0.064 persen. Sejalan dengan penelitian Sayekti (2011) Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. Sementara Upah Minimum

Kabupaten/Kota dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan dalam peningkatan kunjungan bagi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, dengan itu akan dapat meningkatkan nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Sebab pariwisata adalah sumber utama perekonomian di Bali, selain itu perkembangan pariwisata di Bali harus memperhatikan dan meningkatkan sektor lain yang ada seperti pertanian sehingga dengan berkembangnya pariwisata dapat mengembangkan sektor lainnya. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan pengeluaran pemerintah terkait program-program penyerapan tenaga kerja agar program yang dilaksanakan dapat tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu. Selain itu, pengeluaran pemerintah lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur publik sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya. Sehingga tujuan dari pengeluaran pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat dapat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sehingga terciptanya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dengan mutu yang berkualitas sehingga dapat terserap sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Dengan terserapnya tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan menambah output dalam perekonomian.

REFERENSI

- Anuari, D. (2018). Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2010-2016 Perspektif Ekonomi Islam (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).
- Budhijana, R. B. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(1), 36-44.
- Butkiewicz, J. & Yanikkaya, H. 2011. *Institutions and The Impact of Government Spending on Growth*. Journal Of Applied Economics. Vol. XIV, No. 2, Hal. 310-341.
- Dalamagas, Basil. 2010. *Public Sector and Economic Growth: The Greek Experience*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32 (3), 227-228.
- Havira, F. (2017). Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kesenjangan Ekonomi Di Provinsi Lampung (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).
- Hidayah, N. (2020). Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Utara (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Kartika, I Nengah dan I Wayan Wenagama. 2015. STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI BALI
- Nababan, Tongam Sihol. 2017. *Effects of The Number of Industrial Enterprises, Values of Input And Output, And Regional Minimum Wage On Labor Demand In Indonesia: Empirical Study On Micro Industrial Enterprises. Review of Integratif Bussiness And Economic Search*. Vol. VI, Iss. 4.
- Ningsih, Ni Made Cahya Dan I Gst. Bagus Indrajaya. 2015. *Pengaruh Modal Dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Perak*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. VIII (1).
- Prastyadewi, Made Ika. 2014. *Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan Hotel Dan Restoran Di Provinsi Bali*. Vol 4 (2).
- Pratiwi, N. P. A., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*. Vol, 24(2).
- Purnami, Izatun. 2015. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2013*. Skripsi. Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rusniati, Ririn., Sudarti & Atut Frida Agustin. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).

- Rustariyuni, Surya Dewi. 2014. *Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode 2004- 2012*. Vol X No. 1: 45 – 55
- Suciptawati, Ni Luh Putu; Made Asih; Dan Ni Nyoman Sri Artini, 2012. *Tanggapan Masyarakat Desa Terpencil Terhadap Wajib Belajar 9 Tahun*. Jurnal Piramida. Vol.VIII No. 1: 32 – 38
- Suindyah, Sayekti. 2011. “Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol 15. No 4. Hal. 477-500
- Wijayanto, H., & Olde, S. (2020). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 13(1), 85-94.
- Yasa, I Komang Oka Artana Dan Sudarsana Arka. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol. VII, No. 1.